

PEMILIHAN SISTEM WARIS DALAM HAL PERBEDAAN AGAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN ADANYA KEPEMILIKAN REKENING BERSAMA DI BANK

ABSTRAK

Pada setiap kehidupan sudah menjadi kodrat alam akan selalu terjadi peristiwa Hukum kelahiran dan kematian, setiap peristiwa hukum yang terjadi akan selalu menimbulkan akibat Hukum yang berbeda. Akibat hukum yang selanjut timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah waris dan pembagiannya. Persoalan hukum terkait waris dalam kehidupan masyarakat sangat beragam dan dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan bidang hukum lainnya salah satunya hukum perbankan. Salah satu contoh kasus yang memiliki keterkaitan antara hukum waris dengan hukum perbankan yaitu dengan adanya rekening bersama yang dimiliki oleh ayah dan anaknya di bank, namun persoalan timbul ketika ayahnya meninggal dunia. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang pemilihan sistem hukum waris dan pembagiannya masing – masing.

Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan beberapa alternatif, antara lain dengan menggunakan KUH Perdata, Hukum Islam ataupun Hukum adat. Namun demikian karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan para ahli waris yaitu agama Islam dan Kristen sehingga apabila dipilih salah satu diantara keduanya, maka ada pihak – pihak yang merasakan dirugikan, sehingga penyelesaian dilakukan dengan mediasi untuk pembagian warisanya. Apabila mengacu pada Hukum Perdata mengacu pada *legitime portie* setiap ahli waris dengan tidak memandang kedudukan dan gender memiliki besaran bagian yang sama, semisal jika terdapat satu kesatuan budel harta waris dari si meninggal yang ditinggalkan untuk empat orang ahli warisnya maka satu budel harta waris tersebut dibagi kepada empat orang ahli warisnya dengan jumlah yang sama besarnya setelah dikurangi bagian mutlak seorang istri, sedangkan jika menggunakan Hukum waris Islam maka setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda sesuai dengan kedudukannya jika dalam silsilahnya terdapat ahli waris laki – laki, perempuan dan seorang istri maka bagian ahli waris istri sebesar 1/6 anak perempuan sebesar 2/3 dan anak laki – laki mendapat asbah atau seluruh sisa harta waris.

Saran bagi pemerintahan, karena banyaknya gugatan mengenai perbedaan hukum waris yang dianut antar para ahli waris dan tidak maka seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan Hukum waris mana yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan, atau cara penyelesaian bagaimana yang paling tepat dalam menyelesaikan perselisihan perbedaan Hukum waris tersebut. Bagi dunia perbankan, sudah seharusnya dibuat peraturan yang mengakomodasi produk perbankan rekening gabungan, karena sangat penting adanya pembatasan dan aturan yang mengatur mengenai rekening bersama tersebut, baik. Mediasi dapat menjadi solusi penyelesaian persoalan hukum dalam hal tidak dapat terselesaikannya permasalahan menggunakan aturan per Undang – Undangan yang ada, sehingga dapat menggunakan mediasi untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan cara membicarakan kehendak masing – masing pihak dan mencari titik tengah dari keinginan masing – masing pihak

KATA KUNCI

Sistem waris, Perbedaan agama, Pewaris, Rekening Bersama, mediasi.

**THE SELECTION OF HERITAGE SYSTEMS ON RELIGION
DIFFERENCES BETWEEN PEWARIS AND WARIS EXPERIENCES
ASSOCIATED WITH THE PRIVATE OWNERSHIP OF THE ACCOUNT IN
THE BANK REVIEWED FROM APPLICABLE LEGAL SYSTEMS IN
INDONESIA**

In every life has become nature, there will always a law of born and death, every legal event that occurs will always cause different legal consequences. The legal consequences that ensued, with the occurrence of a legal event of someone's death, including the issue of inheritance and division. Legal issues related to inheritance in people's lives are very diverse and it is possible to have links with other legal fields, one of which is banking law. Example of a case that has a relationship between inheritance law and banking law is that there is a joint account owned by his father and son in the bank, but the problem arises when his father dies. For this reason, there is a need for legal certainty regarding the selection of inheritance legal systems and their respective division.

The solution that can be done is with several alternatives, namely by using the Civil Code, Islamic Law or Customary Law, however, because of the religious differences between the heirs and heirs, namely between Christian and Islam religions, so the choice of inheritance law between the Civil Code and Islamic Law then a conflict occurs where the settlement is done by mediation for the distribution of the inheritance. When referring to the Civil Code the law refers to legitime portie, each heir does not regard the position and gender as having the same part, such as if there is one unit of inheritance from the deceased left for four heirs then one inheritance is divided to the four heirs with the same amount after deducting the absolute part of a wife, whereas if using Islamic inheritance then each heir has a different part according to his position if there are male, female and a wife heirs in his genealogy the heirs of the wife amount to 1/6 girls of 2/3 and boys receive asbah or all remaining inheritance

Suggestions for the government, because of the many lawsuit regarding differences in inheritance laws adopted between heirs and cannot be resolved properly by the court because the fair value of each individual is different, then the government should issue a regulation stating which inheritance law is the most appropriate for resolving disputes , or how to resolve the most appropriate way to resolve disputes over the inheritance law. For the banking sector, regulations should be made that accommodate joint account banking products, because it is very important that there are restrictions and rules governing the joint account, both the use of the account and possible problems that will arise from the use of the joint account.

KEYWORDS

Inheritance system, religious differences, heirs, joint accounts

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
A. Kasus Posisi	5
B. Permasalahan Hukum	7

BAB II DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENULISAN

1. KUH Perdata	9
2. Undang – Undang Perbankan	10
3. Peraturan Menteri Agama	11
4. Fatwa Waris Makamah Agung	11
5. Kompilasi Hukum Islam	12
6. Perjanjian Para Pihak.....	14
7. Akte Kelahiran.....	15
8. Kartu Keluarga.....	15
9. Kartu Tanda Penduduk	15

BAB III PEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN REKENING BERSAMA DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

A. Waris Pada Umumnya	17
B. Sistem Pewarisan Di Indonesia	25
1. Hukum Waris Islam	25
2. Hukum Waris KUH Perdata	34
3. Hukum Waris Adat.....	48

C. Perbankan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Fasilitas

Rekening bersama.....	54
-----------------------	----

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Pemilihan Hukum Waris Dalam Hal Terdapat Perbedaan

Agama Antara Pewaris Dan Ahli Waris.....	74
--	----

B. Hak Para Ahli Waris Dan Hak Pemilik Rekening Yang Masih

Hidup Atas Dana Dalam Rekening Dalam Hal Salah Satu

Pemilik Meninggal Dunia Dan Pembagian Dana Antara Para

Ahli Waris	79
------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	84
------------------	----

B. Rekomendasi.....	85
---------------------	----